

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman., Hermansyah, Ahmad Jalis, Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Grup 2007.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, 1993.
- Erman Rajagukguk, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Herry Susanto, SH.,MH.,NOT, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan 12, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro, , *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip, 1999.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persadaran, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Voctor dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Jakarta Rineka Cipta, cetakan pertama, 1993
- Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama,, Bandung, 2005.
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum-Inggris Indonesia*, Cetakan 5, Sinar Grafika, 2008

S.Gautama *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1974.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ecuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia dan Pembukaan Konsulat, Republik Indonesia di Tawau, Malaysia.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor: 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986

[Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby.](#)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Internet

Laman resmi Kementerian Luar Negeri, yakni www.deplu.go.id dan www.aksesdeplu.com

Laman resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal www.bkpm.go.id

Laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
www.kemhumham.go.id

Laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) : www.bphn.go.id

Laman resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.kata.web.id/>

Laman Resmi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Canada (Toronto)
<http://www.kemlu.go.id/toronto/id/layanan-konsuler/legalisasi.aspx>

Laman resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra-Australia:
<http://www.kbri-canberra.org.au>

Laman resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia
<https://www.kbrikualalumpur.org>

Laman resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern, Konfederasi Swiss merangkap Keharyapatihan <https://www.kemlu.go.id/bern/id/layanan-konsuler/legalisasi.aspx>

Forum Internasional

Forum Harmonisasi Nasional dan Hukum Internasional mengenai posisi Indonesia terhadap The Hague Convention of 5 October 1961. Abolishing the requirement of legalization for foreign public documents dan posisi Indonesia terhadap *draft ASEAN convention on abolishment of the requirements of legislation for foreign public documents used in executing requests for judicial assistance among ASEAN countries* yang diselenggarakan pada 25 Maret 2013.

Jurnal

Repertorium – Jurnal Pemikiran & Penelitian Bidang Keperdataan dan Kenotariatan, Edisi 3, Januari – Juni 2015, Tahun II, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Hans Van Loon, ‘*The Hague Conference on Private International Law*’, Hague Justice Journal. 2007.

Kuliah Umum

Kuliah Umum Annual Lecture Mengenang Tokoh Diplomasi Muhammad Hatta di Universitas Bung Hatta, tanggal 22 Februari 2008.oleh, Dr. N. Hassan Wirajuda.

